

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa

Eri Setianingsih

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia

Email: erisetianingsih@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Misalnya, seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Oleh sebab itu peran mahasiswa sedikit banyak dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi. Karena mereka merupakan kaum intelektual yang mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dan menerobos kebiasaan buruk yang berkembang di dalam masyarakat. Mahasiswa merupakan "Agen Of Change" dan "Power Of Control" dimana harapan yang besar pada mahasiswa dapat menangani tindakan korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Peran Mahasiswa, Anti Korupsi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie (Riyanti et al., 2024). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Tindakan korupsi merupakan perbuatan yang tercela atau tidak baik, yaitu dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Qonita & Nurgiansah, 2023). Di Indonesia, korupsi sudah banyak terjadi diberbagai kalangan. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi (Yuniaswati et al., 2024).

Kasus tersebut banyak sekali terjadi di kalangan pejabat negara dan pemerintahan dan setiap tahunnya terus terjadi seperti tidak ada hentinya. Beberapa orang menganggap korupsi mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu kali, suap merupakan cara mudah untuk menghindari hukuman (Amalia & Nurgiansah, 2023). Secara umum korupsi berdampak pada lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Berdasarkan konteks yang telah dikemukakan, penulis dapat merumuskan beberapa masalah serta fokus yang akan dibahas dalam penelitian, melalui pertanyaan-pertanyaan berikut: Mengapa pendidikan antikorupsi penting ditanamkan pada diri mahasiswa? Bagaimana peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi?

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih bersifat riset dan analisa. Dengan analisa yang di

lakukan secara mendalam, akhirnya bisa di pahami dan di ambil poin-poin penting tentang sebuah kejadian atau masalah sosial di masyarakat. Selain itu, pemahaman akan topik yang di angkat bisa di dapatkan secara luas dan lebih detail dengan menggunakan metode tersebut. Pada metode ini, penulis membaca artikel dan tuisan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah serta yang berkaitan dengan masalah seputar korupsi dikalangan pejabat dan mahasiswa di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Korupsi

Mengapa orang memilih menjadi korup daripada jujur? Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum: Teori Triangle Fraud (Donald R. Cressey) Ada tiga penyebab mengapa orang korupsi yaitu adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi (rationalization). Teori GONE (Jack Bologne) Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs) dan pengungkapan (expose). Teori CDMA (Robert Klitgaard) Korupsi (corruption) terjadi karena faktor kekuasaan (directionary) dan monopoli (monopoly) yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (accountability). Teori Willingness and Opportunity Menurut teori ini korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Teori Cost Benefit Model Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya (Wibowo et al., 2024).

Manfaat Mempelajari Pendidikan Anti Korupsi bagi Mahasiswa

Sejak terbentuknya lembaga antirasuah KPK pada tahun 2002 silam, sampai sekarang tercatat sudah puluhan bahkan ratusan pejabat publik yang terpaksa mendekam di balik jerusi besi karena terjerat kasus korupsi. Tercatat di tahun 2015 silam tak kurang dari 13 pejabat publik negeri ini telah dididuk dan dijebloskan ke penjara. Irjen Djoko Susilo, Rudi Rubandini, Lutfi Hasan Ishaq, MirAnda S. Gultom, Ratu Atut Chosiyah, Aulia Pohan, Anas Urbaningrum, Muh Nazaruddin, Andi Malarangeng, Surya Dharma Ali,Urip Tri Gunawan,dan banyak lagi pejabat yang ditangkap pada tahun-tahun berikutnya. Para tersangka tersebut bukan orang sembarangan. Mereka adalah para pejabat tinggi negeri ini. Mereka terlihat sangat santun di hadapan publik, bahkan di belakang nama-nama mereka ada title dan gelar yang mewakili informasi bahwa mereka telah menempuh pendidikan tinggi, dan menyelesaikan prosesnya. Ya, mereka adalah para intelektual, para sarjana negeri ini. Sejarah mencatat bahwa mahasiswa merupakan inisiator berbagai peristiwa penting yang menentukan nasib bangsa Indonesia.

Pergerakan Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), proklamasi kemerdekaan (1945), sampai dengan pergerakan mahasiswa untuk reformasi (1998). Itu adalah deretan peristiwa penting yang digawangi oleh pemuda dan mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual tentu mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki harus dipergunakan untuk menerobos kebiasaan buruk yang berkembang di dalam masyarakat. Maka dari itu, peran para mahasiswa dalam menangani kasus korupsi, tentu saja sangat urgent. Pengamatan dan penelitian mereka dalam kasus ini sangat berguna bagi suksesnya pembangunan bangsa. Sebuah penelitian besar yang melibatkan berbagai fihak akan mampu merumuskan sebuah solusi. Penelitian oleh para mahasiswa dari akar sebuah masalah, diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat korupsi. Mendeskripsikan korupsi dari berbagai aspek dan sudut pandang, mengumpulkan variable-variabel yang terkait, kemudian mengolah data dan informasi dengan cermat, akan bermuara pada sebuah kongklusi yang merupakan solusi permasalahan.

Mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai *'agent of change'* dikatakan sebagai peserta didik yang kritis terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Maka mahasiswa dapat menciptakan atmosfer baru dalam pembangunan. Dana yang dihimpun dari masyarakat luas oleh pemerintah, akan tersalurkan tepat sasaran tanpa dikorupsi. Pembangunan berjalan lancar, masyarakat mempercayai kinerja pemerintah. Dan tercipta masyarakat adil makmur berdasarkan PancaSila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana di cita-citakan oleh para leluhur kita. Dan itu akan terwujud dengan sempurna lewat tangan-tangan dingin mahasiswa yang bersungguh-sungguh berharap pada cita-cita bersama.

Pejabat Anti-Kritik

Melihat realita aktivis mahasiswa masa kini, tidak heran rasanya bila banyak pejabat anti kritik dan bungkam terhadap aspirasi yang disuarakan. Kalimat pembelaan dari pejabat begitu sering didengar, namun apa yang dijanjikan urung terlaksana. Bagi aktivis mahasiswa, tentu sudah sering mendengar bagaimana pejabat mengaku pernah menjadi seorang aktivis. "Dulu saya juga aktivis sama seperti adek-adek, jadi saya mengerti apa yang adek-adek inginkan" lebih kurang demikian kalimat sakti milik mantan aktivis mahasiswa yang menduduki jabatan publik. Mengapa mantan aktivis mahasiswa yang dulu selalu berkoar-koar menyuarakan suara rakyat malah ikut bermain di pemerintahan? Hal ini terjadi akibat ideologi setengah matang yang diterapkan selama menjadi mahasiswa. Selalu bersuara menyuarakan perubahan, namun lupa menjadi contoh untuk perubahan itu sendiri. Hal itu pula yang menyebabkan banyak koruptor yang mengaku dahulu merupakan aktivis mahasiswa. Oleh karenanya, hal itu juga memberikan efek negatif terhadap tempat ia bernaung sewaktu mahasiswa. Dahulu sewaktu menjadi mahasiswa selalu berkoar-koar dan mengkritik kebijakan. Sedikit saja ada kesalahan dari pemerintah, langsung beraksi dengan fatwa-fatwa dan nyanyian-nyanyian revolusi. Bahkan setiap suara yang disuarakan merupakan suara rakyat yang tertindas akibat kebijakan tersebut. Namun semangat revolusioner itu seolah lenyap tanpa bekas tatkala mendapat jabatan penting di pemerintahan (Salminati & Pringgowijoyo, 2024).

Perlu Berbenah

Melihat realita aktivis mahasiswa itu, perlu rasanya dilakukan perubahan di lingkungan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa harus terlebih dahulu menerapkan nilai-nilai kebaikan terhadap diri sendiri sebelum mengajak orang lain untuk melakukannya. Mahasiswa harus mengingat kembali peran utamanya sebagai bagian dari kaum intelektual. Peran utama dari mahasiswa menurut Arbi Sanit ialah "*membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap kelalaian penguasa di dalam tugasnya menyelenggarakan pemerintahan atas nama rakyat*". Tugas dari mahasiswa itu sendiri sebagai *agent of change* adalah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bila mahasiswa berbicara antikorupsi, maka terlebih dahulu nilai-nilai antikorupsi tersebut diterapkan terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, bila mahasiswa ingin melakukan kampanye tertib berlalu lintas, tentu terlebih dahulu harus mampu memberikan contoh yang baik bagaimana tertib berlalu lintas itu. Mustahil orang akan mengikuti instruksi untuk tertib berlalu lintas bila yang mengkampanyekan masih melanggar. Aktivis mahasiswa hendaknya terlebih dahulu melakukan evaluasi diri, sebelum mengevaluasi kebijakan pemerintah. Jangan menjadi aktivis anti kritik, seperti halnya pejabat yang mengaku dahulu pernah menjadi aktivis. Sebab, tidak mungkin masyarakat akan mengikuti kebaikan yang dikampanyekan bila yang melakukan kampanye saja melanggar apa yang hendak dikampanyekan. Mahasiswa dalam melakukan suatu pergerakan harus didasari oleh kecerdasan fikiran yang lebih dari masyarakat. Hendaknya pula, apa yang disuarakan dapat diterima di lingkungan masyarakat, jangan sampai memaksakan kehendak sendiri. Sebab bila terbiasa untuk memaksakan kehendak, maka saat nanti menjadi pejabat publik juga akan

menjadi pejabat yang anti-kritik. Dalam gerakannya, mahasiswa harus berfikir dengan matang dan mengerti dengan apa yang harus dipatuhi selama menyuarakan perubahan. Harus mencerminkan budi pekerti luhur yang baik sehingga apa yang disuarakan dapat diterima dan diserap oleh masyarakat. Kemudian setelah melakukan kajian untuk mencerdaskan internal rumah tangga sendiri, barulah masuk menusuk kedalam masyarakat. Jangan biarkan ilmu yang telah difikirkan dengan baik musnah tanpa bekas. Karena pada hakikatnya, mahasiswa itu “berpikir, bergerak atau mati di tempat”.

Mahasiswa Berperan Strategis dalam Pemberantasan Korupsi

Ketua KPK, Busyro Muquoddas dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional dalam Pemberantasan Korupsi, di Sportorium UMY, Senin (7/3) sore dalam rangkaian Silatnas BEM PTM se-Indonesia yang akan berakhir pada Rabu (9/3), menyampaikan bahwa: Menurutnya, bangsa perlu diberi kontribusi berupa aktivitas konkret yang mana hal tersebut perlu didukung oleh para agen perubahan (agent of change), terutama dari kalangan civitas akademika, terutama mahasiswa. Busyro mengungkapkan korupsi muncul jika ada demoralisasi yang dilakukan aktor kekuasaan. “Aktor kekuasaan tersebut adalah para elite politik dan birokrasi,” jelasnya. Korupsi bisa ditekan jika para aktor kekuasaan punya moral dan etika yang baik. Hampir 70% kekayaan Negara berasal dari penerimaan pajak yang paling rentan menjadi sumber korupsi. “Dari tahun ke tahun, korupsi menjadi permasalahan yang meningkat intensitasnya,” terang Busyro. Busyro mengatakan pentingnya peran mahasiswa dalam meningkatkan kekuatan moral dalam skala nasional jika pergerakan mahasiswa memiliki agenda konkret untuk melakukan pemetaan korupsi. “Mahasiswa menjadi bagian tak terpisahkan dari program KPK untuk bergandengan tangan dengan berbagai unsur masyarakat madani untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi termasuk memberikan advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban korupsi,” pungkas Busyro. Mantan kandidat Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan korupsi tak hanya merugikan keuangan Negara, dan ebih dari itu, korupsi bisa menghancurkan peradaban dimana nilai etika dan sistem keadilan, ekonomi, dan keberlanjutan Negara bisa rusak. Hal ini karena korupsi merupakan miniatur kejahatan yang bisa menghancurkan proses kinerja dan sistem dalam Negara. Sistem Negara justru memproduksi koruptor lebih banyak daripada membawa koruptor ke pengadilan. “Korupsi dilakukan dengan cara yang cerdas, oleh karenanya dalam mengupayakan pemberantasan korupsi, dibutuhkan keterampilan yang mana korupsi dapat dilawan dengan intelektualitas juga dengan memahami berbagai modus operandi yang memungkinkan munculnya korupsi. Dengan ini diharapkan akan muncul gerakan sosial anti korupsi demi perubahan yang lebih baik,” tandasnya.

Dampak Korupsi

Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan

Kesehatan. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain: Dampak ekonomi, Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, Dampak birokrasi pemerintahan, Dampak politik dan demokrasi, Dampak terhadap penegakan hukum, Dampak terhadap pertahanan dan keamanan, Dampak kerusakan lingkungan. Meski studi tentang korupsi terus berjalan, namun belum ada solusi pasti dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Sebab, suatu cara menangani korupsi bisa efektif di satu negara atau di satu wilayah tapi belum tentu berhasil di negara lain.

KESIMPULAN

Dari berbagai paparan diatas, kesimpulan yang dapat penulis ambil sebagai berikut: Tindakan korupsi disebabkan oleh beberapa faktor seperti tekana, kebutuhan, keserakahan, kesempatan, dsb. Mahasiswa merupakan “Agen Of Change” dan “Power Of Control” dimana harapan yang besar pada mahasiswa dapat menangani tindakan korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan tercela. Banyak mantan aktivis mahasiswa anti korupsi yang menjadi seorang koruptor. Sebelum menyerukan aksi anti korupsi, sebaiknya diterapkan dengan matang terlebih dahulu dan menerapkannya dalam kehidupan pribadi. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi forum kritis yang berlandas Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Mahasiswa menjadi bagian tak terpisahkan dari program KPK dan masyarakat untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi termasuk memberikan advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban korupsi. Dibutuhkannya kaum intelektualitas untuk dapat melawan korupsi, terutama kaum mahasiswa. Korupsi mawujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Dengan diterapkannya pendidikan anti korupsi, diharapkan adanya perubahan lebih baik dalam sistem negara pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Efektivitas Keberadaan Kampung Cyber Terhadap Sikap Nasionalisme, Patriotisme, dan Bela Negara. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(1), 10–15.
- Qonita, N. F., & Nurgiansah, T. H. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Siswa. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(1), 23–30.
- Riyanti, Nurmalisa, Y., & Rohman. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian Peserta Didik. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1), 36–41.
- Salminati, I., & Pringgowijoyo, Y. (2024). Analisis Budaya Paca Dalam Perkawinan Adat di Desa Golo Kondeng. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 19–22.
- Wibowo, M. A. S., Pitoewas, B., & Putri, D. S. (2024). Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 31–40.
- Yuniaswati, D., Pitoewas, B., & Siswanto, E. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala Pekon. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1), 17–25.